



# Penanganan Disabilitas Psikososial Minim

*Akses penyandang disabilitas psikososial terhadap pengobatan kurang. Di Indonesia hanya ada 23 RSJ dan sekitar 600 tenaga psikiater.*

**PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI**  
 putri@mediaindonesia.com

**P**ERHATIAN pemerintah maupun masyarakat kepada penyandang disabilitas psikososial atau biasa disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih sangat minim. Akses mereka untuk menjangkau pengobatan, pekerjaan, hingga hak politik masih sulit.

“Penyandang disabilitas psikososial ini sebenarnya dapat seperti masyarakat pada umumnya bila akses pada pengobatan berjalan baik. Masalahnya, sekarang akses mereka pada hak kesehatan masih sangat minim,” kata Secretary General Human Right and Vulnerable Group Yossa AP Nainggolan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hal tersebut antara lain terlihat dari minimnya jumlah rumah sakit jiwa (RSJ) di Indonesia. Dari 34 provinsi, baru 23 provinsi yang memiliki RSJ.

“Saat ini juga semakin sering ada pemberitaan soal disabilitas psikososial yang dianggap melakukan perusakan dan sejenisnya. Dari sana, harusnya bisa ditangkap bahwa berarti banyak yang belum mendapat pengobatan.

Mereka pasti yang tidak ada akses ke obat dan dokter,” ujar Yossa.

Selain itu, katanya, belum ada pendataan yang komprehensif pada jumlah disabilitas psikososial di seluruh Indonesia. Hal itu terbukti dengan terus ditemukannya kasus penyekapan atau pemasungan penderita disabilitas psikososial yang tidak terakses pengobatan di berbagai daerah di Tanah Air.

“Kalau datanya saja belum pasti, penanganan dan penyediaan obatnya akan sulit tepat. Pemerintah harus menjemput bola dan semakin aktif memantau,” ujar dia lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan Human Right Watch pada 2016, tercatat ada 18.800 penyandang disabilitas psikososial yang masih dipasung karena dianggap sebagai kutukan atau kerasukan setan. Padahal, pemerintah Indonesia melarang praktik pemasungan terhadap mereka sejak 1977.

Dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan, hanya 30% dari 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum yang bisa melayani berbagai jenis perawatan kesehatan jiwa.

Demikian halnya, kata Yos-

sa, tenaga kesehatan jiwa. Pada 2016 jumlah psikiater hanya 600 hingga 800 orang. Artinya, setiap psikiater berlatih menangani 300 ribu sampai 400 ribu ODGJ.

Bahkan, sekitar 70% dari seluruh psikiater berada di Pulau Jawa, dan 40% dari jumlah tersebut bekerja di Jakarta. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk ialah 1:30 ribu orang.

## Manfaatkan CSR

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menambahkan penanganan masalah disabilitas psikososial yang masih minim perhatian juga mengakibatkan banyak panti sosial terbengkalai. Untuk mengatasi itu, berbagai elemen harus turun tangan. Pelibatan berbagai sektor juga harus digencarkan. Tidak hanya yang berada di bawah Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor lain, seperti BUMN dan BUMD.

“Sekarang semua harus dipaksa dan diwajibkan ikut memberi perhatian. BUMN dan BUMD, misalnya, harus didorong untuk menyalurkan CSR kepada penyandang disabilitas psikososial,” ujar Anam. (H-2)